**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT PEMIDANAAN TERHADAP
PEJABAT NEGARA DI BIDANG PERTAHANAN YANG MELAKUKAN
KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN SEBAGAI BENTUK
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT**

Oleh : Naufal Nata Prawira

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I : Dr. Mukhlis R, S.H., M.H

Pembimbing II : Elmayanti, S.H., M.H

Alamat : Jalan Letkol Hasan Basri No. 25 Cinta Raja, Sail, Kota Pekanbaru

Email : naufal.nnp@gmail.com

ABSTRACT

Regulations regarding serious human rights, especially regarding state officials in the defense sector, are regulated in Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts, however, in this regulation there is a problem where there is no distinction between the imposition of criminal sanctions between state officials and the public. in general. This can be seen in article 42 paragraph (3) which regulates the punishment of state officials in the security sector who commit crimes against humanity. This article refers to article 37 as the basis for the punishment of state officials.

This type of research can be classified as normative research which examines legal principles, namely the principle of criminal responsibility. This research uses secondary data by elaborating on primary, secondary and tertiary legal materials that are relevant to the research topic.

Based on the results of the research, it can be concluded that firstly, the absence of differences in the imposition of criminal sanctions between state officials in the defense sector who commit crimes against humanity and ordinary people makes the current regulations weak. This can be seen in Article 42 paragraphs 1 and 3 of Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts which have been the source of law for resolving serious human rights cases and in Article 599 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code which has many problems in the regulations. This means reducing the minimum criminal sentence for someone who commits crimes against humanity. Secondly, in forming regulations it is actually necessary to consider philosophical, sociological and juridical factors. In the case of Brigadier General TNI M. Noer Muis in the East Timor case, he was acquitted of all charges against him and Infantry Major Isak Sattu in the Panai case was deemed not guilty of the actions he committed, the results of this verdict show that justice has not been implemented in society. Therefore, it is necessary to reform the criminal law in increasing punishment for state officials in the defense sector who commit crimes against humanity in Indonesia.

Keywords: Criminal Law Policy, Sentencing, State Officials, Crimes Against Humanity

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) hakikatnya merupakan hak yang ada pada diri setiap individu yang dibawa sejak seorang itu lahir dan melekat pada dirinya. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa HAM merupakan sebuah aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang kehadirannya bertujuan untuk menjaga kenyamanan, keselamatan serta hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia agar tidak saling bertabrakan antara satu sama lain. Dalam konteks melindungi dan menjaga eksistensi HAM, hal tersebut merupakan sebuah keharusan bagi setiap individu serta negara. Negara menjamin terpenuhi dan terlindunginya HAM di masyarakat melalui aparat atau pejabat negara yang secara khusus menjalani tugas tersebut.¹

Dalam prinsip HAM, negara adalah sebagai pemangku HAM (*duty bearer*) dan setiap individu dalam naungan yurisdiksinya merupakan pemegang HAM (*rights holder*). Negara dalam sistem HAM tidak memiliki hak. Oleh karena itu, negara hanya memiliki tanggung jawab (*obligation or responsibility*) untuk memenuhi hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok dan dijamin dalam instrumen HAM. Negara yang dalam konteks ini merujuk pada pejabat atau aparatur negara, mempunyai sebuah tanggung jawab mutlak yang mewajibkannya memberikan jaminan, penghargaan serta menjunjung tinggi keberadaan HAM di Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28A sampai 28J.

Permasalahannya, kewajiban pejabat pemerintahan tersebut belum dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sosial masyarakat yang sebenarnya. Masih banyak kasus-kasus

pelanggaran HAM yang didalamnya turut terlibat pejabat atau aparatur negara yang mana dalam hal ini mencakup TNI. Hal ini dikarenakan adanya hukuman yang dianggap ringan dalam penerapannya dan apabila dibiarkan begitu saja maka hal tersebut tidak dapat mengakomodir pertanggungjawaban dari pejabat negara penegak hukum. Pada isi dari undang-undang HAM belum adanya sebuah konsepsi khusus yang digunakan untuk mengatasi masalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat yang berpotensi merusak iklim perlindungan HAM yang ada di Indonesia.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusia banyak dibahas oleh para ahli. Selanjutnya dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai pengadilan HAM maka dikenal dua bentuk pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat.²

Semakin terbelengainya pengusutan dan pengungkapan pelanggaran HAM Berat di masa lalu tentu akan membawa dampak yang tidak baik jika tidak sesegera mungkin dilakukan langkah-langkah menuju arah penyelesaian.³ Hal tersebut dikarenakan rendahnya penegakan Pelanggaran HAM Berat yang kemudian membuka peluang bagi para penguasa, termasuk para penegak hukum, untuk melakukan pelanggaran HAM melalui celah-celah konstitusi dengan membuat kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempunyai resiko terhadap berbagai pelanggaran HAM Berat khususnya pejabat pertahanan yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁴

¹ Susani Triwahyuningsih, Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 113.

² Vonny A. Wongkar, Tanggung Jawab Komando Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat dan Kejahatan Perang Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Thesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2006, hlm. 3.

³ Artidjo Alkostar, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007, hlm. 396.

⁴ Levina Yustitianiingtyas, Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi dalam Tindakan Pelanggaran

Sebagai bukti konkret dapat dilihat pada kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang dilakukan oleh pejabat negara TNI pada kasus Brigadir Jendral M. Noer Muis terkait kasus di timor timur pada tahun 1999 dan Kasus Mayor Infantri Isak sattu dalam kasus panai di papua pada tahun 2014. Melihat dari kasus tersebut Rendahnya penghukuman bagi pejabat negara yang melakukan pelanggaran HAM Berat khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan maka perlu adanya penyelesaian yang harus di tangain oleh pemerintah.

Tidak hanya dalam prakteknya, dalam aturan terkait penegakan pelanggaran HAM berat khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan mengalami persoalan. Dimana dalam Pasal 42 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dari ketentuan pasal tersebut mengenai pemidanaannya tidak ada yang membedakan antara orang biasa dengan pejabat negara di bidang pertahanan, padahal TNI seharusnya lembaga yang melindungi dan menegakan HAM maka dari itu perlu adanya pembeda antara kebijakan hukum orang biasa dengan pejabat negara di bidang pertahanan. Kebijakan hukum bagi pejabat negara seharusnya memiliki pengaturan tersendiri yang lebih memberatkan terhadap hukuman bagi pejabat negara di bidang pertahanan dan keamanan.

Tidak hanya pada aturan di atas, pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang mempunyai tendensi seakan-akan ingin melindungi pejabat atau aparatur negara yang melakukan pelanggaran HAM. Perihal ini setidaknya tercermin oleh Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 598 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, hukuman bagi pelanggar HAM berat malah dipersingkat menjadi pidana

penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun, dari yang sebelumnya pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Karena pada dasarnya pejabat negara merupakan *Regulator of Legal Right* (pengatur hak hukum) dan juga pejabat negara yang mana dalam hal ini pemegang Hak Asasi Manusia tidak mendapatkan timbal balik akan tetapi negara harus melindungi individu pemegang hak asasi manusia. Oleh karena itu perlu dibedakan penghukumannya karena dalam jabatan yang telah di emban oleh pejabat negara berbeda dengan masyarakat umum lainnya sebagai bentuk dari pertanggung jawaban pidana dari seorang pejabat negara di bidang pertahanan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, peneliti ingin mengangkat dan menggagas judul **“Kebijakan Hukum Pidana Terkait Pidanaan Terhadap Pejabat Negara Di Bidang Pertahanan Yang Melakukan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pejabat Negara di Bidang Pertahanan Yang Melakukan Kejahatan Terhadap kemanusiaan sebagai bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku?
2. Bagaimanakah Upaya Yang Tepat Dalam Pemberatan Hukuman Bagi Pejabat Negara di Bidang Pertahanan Yang Melakukan Kejahatan Terhadap kemanusiaan Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk Mengetahui Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pejabat Negara di Bidang Pertahanan Yang Melakukan Kejahatan Terhadap

kemanusiaan sebagai bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

- b) Untuk Mengetahui Upaya Yang Tepat Dalam Pemberatan Hukuman Bagi Pejabat Negara di Bidang Pertahanan Yang Melakukan Kejahatan Terhadap kemanusiaan Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi para peneliti maupun pihak lainnya.
- c) Penelitian ini secara teoritis maupun praktis diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum terkhususnya Fakultas Hukum Universitas Riau serta masyarakat umum mengenai Kebijakan Hukum Pidana Terkait Pidanaan Terhadap Pejabat Negara di Bidang Pertahanan yang Melakukan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan sebagai bentuk Pelanggaran HAM berat.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidanaan

Terdapat beberapa teori pidanaan yang terdiri dari teori absolut/ teori pembalasan, teori relatif/ teori tujuan, dan teori gabungan. akan tetapi teori yang tepat untuk saya gunakan di dalam penulisan kali ini yaitu teori relatif atau teori tujuan.

Menurut Muladi tentang teori relatif ini bahwa:⁵ “Pidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat

untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

2. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Dalam rangka membangun sistem hukum pidana nasional, pembaharuan hukum pidana merupakan langkah yang tepat untuk menciptakan sistem hukum nasional yang berorientasi kepada tujuan bangsa Indonesia bernegara. Tujuan dari pembaharuan tersebut untuk mewujudkan hukum pidana yang bekarakter Indonesia dengan penyusunan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁶

Barda Nawawi Arief mengkonstatasi bahwa latar belakang dan urgensi perlu adanya pembaharuan hukum pidana berhubungan erat dengan berbagai aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan yang mana khususnya berkaitan dengan kebijakan sosial (*social policy*), kebijakan kriminal (*criminal policy*), dan aspek dari aspek kebijakan penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement policy*).⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan Hukum Pidana atau dapat disebut dengan *Penal Policy* menurut Marc Ancel adalah suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak

⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 27.

⁶ Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 364.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenamedia Group, Semarang, 2016, hlm. 29.

hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksanaan putusan pengadilan.⁸

2. Pidana menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang.⁹
3. Pejabat Negara menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mendefinisikan Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-undang.
4. Pertahanan Negara menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara mendefinisikan Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
5. Tentara Nasional Indonesia adalah masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan nasional.¹⁰
6. Hak Asasi Manusia Berat menurut penjelasan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan Hak Asasi Manusia Berat

adalah pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (*arbitrary/ extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, deskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic descrimination*).

7. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan secara garis besar menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe asas-asas hukum.

2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber dari bahannya. Data sekunder yang dimaksud yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh penulis meliputi peraturan perundang-undangan, dan segala macam dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu buku-buku hukum, pendapat para ahli, jurnal-jurnal hukum dan hasil dari penelitian sebelumnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹¹

⁸ *Ibid*, hlm. 27.

⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 1.

¹⁰ Endriartono Sutarto, *Kewajiban Prajurit Mengabdikan Kepada Bangsa, Pusat Penerangan TNI*, Jakarta, 2005, hlm. 21.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 15.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode Studi Kepustakaan melalui literatur fisik dan penelusuran literatur elektronik.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu secara normatif serta analisis kualitatif. Yang mana Penelitian ini menjabarkan kesimpulan dengan menarik data dari hal-hal yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan hukum pidana berasal dari bahasa Inggris yakni *policy* atau dalam bahasa Belanda *politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam arti luas termasuk juga aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, permasalahan yang terjadi di masyarakat atau bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan penerapan hukum atau peraturan dengan tujuan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, politik hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.¹²
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-

citakan.¹³

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang sudah diuraikan sebelumnya, terlihat bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, akan tetapi sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas dari pada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahapan konkretisasi /fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:¹⁴

- a. Kebijakan formatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu penerapan hukum pidana;
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. Fungsionalisasi tersebut yang menjadi batu pijakan suatu kebijakan hukum pidana dalam membentuk satu kesatuan dari hukum pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Pejabat Negara Dibidang Pertahanan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 1 ayat (5) mendefinisikan pertahanan negara yaitu segala usaha untuk menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Sedangkan pejabat negara menurut Utrecht, pejabat adalah seorang yang mewakili suatu jabatan, yakni menjalankan suatu lingkungan pekerjaan tetap guna kepentingan negara.¹⁵

¹² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 159.

¹³ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

¹⁴ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 83.

¹⁵ E. Utrecht Di Terjemahkan oleh Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Penerbit dan Balai Buku Ichtar, Jakarta,

Tentara Nasional Indonesia atau disebut dengan TNI mempunyai fungsi penting dalam menjaga pertahanan serta keamanan nagara indonesia, adapun fungsi yang tertuang menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang dapat penulis simpulkan yaitu:

- a. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal dari segala bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- b. TNI sebagai penindak terhadap segala bentuk ancaman yang berupa ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- c. TNI sebagai alat pertahanan negara memiliki fungsi pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat dari kekacauan keamanan;
- d. TNI sebagai dalam melaksanakan fungsinya merupakan komponen yang utama dalam sistem pemerintahan negara.

Fungsi-fungsi yang telah disebutkan diatas merupakan suatu bentuk dari pelaksanaan dari aparat TNI dalam menjalankan kewajibannya di dalam masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

Definisi dari pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat itu sendiri merupakan pelanggaran yang dilakukan dengan perbuatan mengancam nyawa seseorang ataupun individu yang dilakukan oleh individu atau kelompok lain.

Kategori yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana pada pelanggaran hak asasi manusia berat terkait dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor

39 Tahun 1999 adalah:

- a. Setiap orang (orang perseorangan dan/ atau kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual).
- b. Yang melakukan pelanggaran berat atas hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Bagi seorang pelaku yang melakukan pelanggaran berat atas hak asasi manusia dikenakan sanksi hukuman pidana berupa pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara sesuai dengan ketentuan pasal 36 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999.¹⁶

Pelanggaran HAM berat di indonesia pada dasar nya di atur dalam pasal 104 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Di dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa: Pelanggaran HAM berat adalah pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (*arbitrary/ extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, deskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*). Adapun pelanggaran HAM berat yang diakui oleh negara indonesia itu sendiri terbagi atas 2 jenis yakni Kejahatan Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.

D. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan pada prinsipnya merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak-hak terpenting dalam hidup seseorang (seperti: pembantaian, membunuh, melakukan perbudakan) yang dilakukan sebagai bentuk serangan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis kepada masyarakat sipil yang dihasut, diampuni, atau di toleransi oleh otoritas negara maupun non negara, serta dapat dilaksanakan baik itu dalam kondisi perang perang ataupun dalam kondisi berdamai. Kejahatan terhadap kemanusiaan dapat digolongkan menjadi

1985. Hlm. 36.

¹⁶ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 56.

dua jenis yakni serangan “tipe pembunuhan” yang dilakukan kepada masyarakat sipil dan “tipe penghukuman” yang dilakukan kepada kelompok tertentu baik itu memiliki latar belakang politik, ras, nasional, etnis, kultur, agama, jenis kelamin, ataupun aspek lain yang secara universal telah dilarang dalam Hukum Internasional, seperti yang telah maksudkan dalam Statuta Mahkamah Pidana Internasional.¹⁷

Dalam hukum internasional, pengaturan kejahatan terhadap kemanusiaan di atur dalam Statuta Roma pada konferensi Diplomatik PBB pada tanggal 17 juli tahun 1998 dan dihadiri oleh 160 negara. Pada konferensi tersebut mendefinisikan Kejahatan Terhadap kemanusiaan yang tercantum dalam pasal 7 ayat 1 Statuta Roma 1998 yang mana pada point penting dalam kejahatan terhadap kemanusiaan yakni bersifat meluas (*widespread*) dan sistematik (*systematic*) yang menjadi hal terpenting dari kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan atau *Crimes Against Humanity* sebagai salah satu *Internasional Crimes*, menurut Muladi, pakar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, harus memenuhi tiga unsur utama yaitu:

- a. Unsur Internasional, yaitu berupa:
 1. Ancaman secara langsung atas perdamaian dan keamanan dunia;
 2. Ancaman secara tidak langsung atas perdamaian dan keamanan dunia;
 3. Menggoyahkan perasaan kemanusiaan.
- b. Unsur Transnasional, yaitu berupa:
 1. Tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara;
 2. Tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu negara;

3. Sarana dan prasarana serta metode-metode yang digunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara.
- c. Unsur Necessity, unsur ini berupa *cooperation of state necessary to enforce* (kebutuhan akan kerjasama antar negara untuk melakukan penanggulangan).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pejabat Negara Di Bidang Pertahanan Yang Melakukan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM Berat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

1. Pengaturan Hukum Pidana Terkait HAM Berat dalam Hukum Internasional

Pengaturan hukum pidana terkait pelanggaran hak asasi manusia berat di dalam hukum internasional itu sendiri sebetulnya sudah lama di bentuk, mulai dari Piagam Pengadilan Militer Internasional Nuremberg yang mengatur tentang kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Tidak hanya Piagam Pengadilan Militer Internasional, pengadilan internasional juga mengatur untuk penuntutan orang-orang yang diduga bertanggungjawab atas pelanggaran serius hukum humaniter internasional di wilayah bekas Yugoslavia sejak tahun 1991 dimana perjanjian tersebut dibentuk berdasarkan resolusi Resolusi Dewan Kemanan PBB No. 827 Tahun 1993. Isi dalam perjanjian tersebut menyebutkan berbagai bentuk pelanggaran serius atau HAM berat, yang berada di bawah kompetensi pengadilan yaitu Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Statuta Pengadilan Pidana untuk Rwanda (ICTR) juga menyebutkan kompetensi nya memfokuskan kepada kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida.

¹⁷ Nanda Sagita Dewi dan Devica Rully Masrur, Kejahatan Kemanusiaan (Crime Against Humanity) Di Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Terhadap Muslim Etnis Uighur, *JCA of LAW*, 2020, Vol. 1 No. 2, hlm. 201.

Alasannya mengapa banyak digunakan karena dua bentuk kejahatan ini dinilai sebagai suatu pelanggaran serius atau HAM berat oleh masyarakat internasional karena dampak dari kejahatan tersebut sangat luar biasa bagi jiwa, raga dan peradaban manusia.¹⁸

Setelah dari banyaknya perjanjian yang telah dibuat, masyarakat internasional berupaya untuk memperbaiki sistem perlindungan hak asasi manusia yang dibuktikan dengan diaturnya hak asasi manusia berat di atur dalam Statuta Roma tahun 1998. pada statuta tersebut membagi hak asasi manusia berat menjadi 4 golongan sesuai dengan pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

“Jurisdiksi Mahkamah terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai yurisdiksi sesuai dengan statuta roma berkenaan dengan kejahatan sebagai berikut:

- a. Kejahatan genosida;
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan;
- c. Kejahatan perang;
- d. Kejahatan Agresi.”

Akan tetapi dari banyaknya kejahatan HAM berat yang telah disebutkan, peneliti hanya akan membahas kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai landasan utama dalam penulisan, dimana pengertian tentang kejahatan terhadap kemanusiaan.

2. Pengaturan Hukum Pidana Terkait HAM Berat Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Pengaturan hukum pidana terkait pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia itu sendiri sebetulnya sudah lama di bentuk.

Terbukti dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai landasan aparatur negara dalam memeriksa dan memutus pemidanaan bagi seseorang melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat. Tidak dapat dipungkiri konsep pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia mengadopsi peraturan yang berasal dari statuta roma. Hal tersebut terlihat Indonesia hanya mengakui 2 pelanggaran hak asasi manusia berat yang mana mirip seperti yang dibentuk dalam Statuta Roma tahun 1998 dimana yang salah satunya membahas tentang kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan itu ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil yang berbentuk:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain

¹⁸ Abdul Hakim G. Nusantara, Penerapan Hukum Internasional Dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia, *Indonesian Journal Of Internasional Law*, Vol. 1, No 4, 2021, hlm. 759.

yang telah di akui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

- i. Penghilangan orang secara paksa;
- j. Kejahatan apartheid.

Terkait pemidanaan bagi seseorang yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia di dalam pasal 37 hingga 40.

Tidak hanya didalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan juga dibahas dalam Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Melihat dari pengaturan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam KUHP terbaru dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terlihat bahwa pemidanaan bagi seseorang yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam KUHP justru diperingan dimana hukumannya yaitu Pidana Mati, Seumur Hidup, Penjara Maksimal 20 Tahun dan Minimal 5 Tahun dibandingkan dengan aturan yang sebelumnya yakni Pidana Mati, Seumur Hidup, Penjara Maksimal 25 Tahun dan Minimal 10 Tahun Hal tersebut tidak sejalan dengan teori pemidanaan khususnya pemidanaan relatif dimana tujuan dari penjatuhan pidana yaitu untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat serta pada tujuan akhir dari suatu pemidanaan yaitu mempertahankan tata tertib hukum di masyarakat. Maka dari itu penghukuman yang lebih berat kepada pejabat dibidang pertahanan yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

3. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pejabat Negara Di Bidang Pertahanan Yang Melakukan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM Berat Berdasarkan Hukum Positif Yang Berlaku.

Pengaturan mengenai hak asasi manusia berat khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh pejabat di bidang pertahanan memiliki pengaturan tersendiri, Pengaturan tersebut diatur secara khusus dalam Pasal 42 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pada pasal tersebut dalam penjatuhan sanksi pemidanaan yang diberikan kepada pejabat negara khususnya dibidang pertahanan tidak adanya pembeda dengan masyarakat sipil biasa ketika melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat khususnya pejabat yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, padahal sebagai pejabat negara dalam hal ini TNI memiliki fungsi sebagai penangkal dari segala bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa seharusnya dapat melindungi masyarakatnya dari kejahatan terkhususnya HAM berat bukan malah sebagai pelaku dari pelanggar hak asasi manusia berat itu sendiri.

Tidak hanya pada aturan di atas, pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang mempunyai tendensi seakan-akan ingin melindungi pejabat atau aparatur negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat khususnya tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Perihal ini setidaknya tercermin oleh Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang

menerangkan bahwa: “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang.”

Berdasarkan pengaturan tersebut membuktikan bahwa lemahnya peraturan yang ada pada saat ini membuat peraturan tersebut seakan-akan memiliki tendensi untuk melindungi seseorang yang melakukan suatu tindak kejahatan dengan cara penghukuman kepada seseorang yang melakukan telah terbukti melakukan kejahatan namun bila perbuatannya dilakukan atas perintah yang diberikan oleh pejabat negara yang berwenang tidak dapat diatuhi hukuman pidana. peraturan tersebut memiliki potensi untuk menyelewengkan jabatan yang telah seseorang dapatkan, padahal seharusnya pejabat negara dengan kekuasaannya harus melindungi masyarakat.

B. Upaya Yang Tepat Dalam Pemberatan Hukuman Bagi Pejabat Negara di Bidang Pertahanan Yang Melakukan Kejahatan Terhadap kemanusiaan Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

1. Faktor-Faktor Yang Mendasar Dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada suatu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam hal ini meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, lalu terkait hirarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan yang terakhir terkait keterbukaan.¹⁹

Berdasarkan asas yang telah dijelaskan di atas dapat diartikan bahwa dalam melakukan suatu pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan sebuah pengaturan yang sesuai dengan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat. Pertimbangan tersebut berupa faktor Filosofis, Sosiologis, maupun Yuridis yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Faktor Filosofis

Jika dilihat melalui pandangan filosofis terkait pembaharuan hukum hak asasi manusia berat khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan perlu adanya sebuah pembaharuan dalam peraturan perundang-undangan hak asasi manusia dimana dalam hal ini pembentukannya berdasarkan pandangan hidup, kesadaran, serta cita-cita hukum yang sesuai dengan suasana kebatinan serta pandangan hidup yang di anut oleh bangsa Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Faktor Sosiologis

Jika dikaji berdasarkan faktor sosiologis, tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan sosial sangat cepat terjadi sehingga perubahan itu perlu disertai dan diikuti oleh suatu perundang-undangan hukum dengan sanksi pidana. hukum juga memiliki fungsi sebagai *social engineering* maupun sebagai *social control* di masyarakat.²⁰

Namun bila dilihat dari konteks kejahatan hak asasi manusia berat khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan yang tergolong dalam pidana khusus

¹⁹ Penjelasan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan

²⁰ Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 38

jenis tindak pidananya memiliki aturan atau ketentuan sanksinya tersendiri, sehingga pengaturannya tidak terbatas hanya kepada undang-undang akan tetapi pidana khusus mengatur juga terkait dengan proses beracaranya juga memiliki banyak sekali persoalan. Maka dari itu hal tersebut mejadi pertimbangan faktor sosiologis dalam melakukan suatu pembaharuan hukum pidana

c. Faktor Yuridis

Peraturan yang mengatur mengenai pelanggaran hak asasi manusia berat yang saat ini dikenal dan dijalankan oleh bangsa indonesia terbilang sudah cukup lama. Belum ada upaya pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengkaji ulang terkait pengaturan tersebut, padahal peraturan tersebut dirasa sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini.

Oleh karena itu, Jika dikaji melalui peraturan yang ada, pada saat ini peraturan yang terkait dengan pejabat negara yang pelanggaran hak asasi manusia berat khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan belum mampu mengakomodir secara baik dalam penegakan hukumnya. Masih tidak terpenuhinya rasa keadilan pada peraturan yang ada saat ini, menjadikan peraturan tersebut perlu dilakukan suatu pembaharuan untuk menciptakan suatu produk peraturan perundang-undangan yang baru.

2. Pertimbangan Pemberatan Sanksi Bagi Pejabat Negara Dibidang Pertahanan Yang Melakukan Pelanggaran HAM Berat Khususnya Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Pertimbangan mengapa perlu adanya pemberatan sanksi bagi pejabat negara dibidang pertahanan

yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam pembaharuan hukum pidana tidak hanya berdasarkan aturan yang selama ini bermasalah, lebih dari itu jika dilihat dari segi penegakan hukum pidana bagi pejabat bidang pertahanan yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan mengalami banyak persoalan serta rintangan.

Dapat dilihat pada kasus pertama yang dilakukan oleh mantan komando resor militer 164 yaitu Brigadir Jendral TNI M. Noer Muis dimana pada putusan pengadilan tingkat pertama yaitu pada putusan nomor 12/PID.HAM/AD.HOC/2002/PN.JKT menyatakan bahwa terdakwa sebagai komandan militer telah gagal melakukan pencegahan dan pembiaran yang mengakibatkan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk pembunuhan serta penganiayaan terhadap masa prointegrasi terhadap masa prokemerdekaan yang setidaknya menewaskan 26 orang meninggal dunia dan dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara.

Kondisi ini diperparah ketika pada proses tingkat banding dimana hakim menyatakan bahwa Brigjen TNI Noer Muis bebas dari segala dakwaan yang dituduhkan kepadanya. Dan juga pada penyelesaian tingkat kasasi yang diajukan oleh kejaksaan kepada mahkamah agung menyatakan bahwa hakim mahkamah agung menolak kasasi yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum.

Pada kasus kedua yang belum lama ini terjadi dilakukan oleh Mayor Infantri Isak Sattu dalam kasus panai di papua yang terjadi pada tahun 2014. Setidaknya pada kasus tersebut sebanyak 4 orang warga meninggal dunia ditembak dan 21 orang lainnya terluka ketika warga melakukan aksi protes terkait pengeroyokan aparat TNI terhadap kelompok pemuda

sehari sebelumnya. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Mayor Infantri Isak Sattu terdakwa diadili pada Pengadilan Hak Asasi Manusia di pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makasar pada juni 2022.

Pada proses pengadilan jaksa penuntut umum menuntut Mayor Infantri Isak Sattu dengan Pasal 42 Ayat (1) huruf a dan b jo Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a jo Pasal 37 Nomor 26 Tahun 2000. Serta Pasal 9 huruf h jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setelah menimbang dan mendengarkan penjabaran dari berbagai keterangan saksi, alat bukti, dan lainnya pengadilan negeri memutuskan Mayor Infantri Isak Sattu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan pelanggaran HAM berat.²¹

Melihat dari kedua kasus tersebut, adanya ketidaksesuaian antara penegakan kasus hak asasi manusia berat khususnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pengaturan yang mengaturnya. Penjatuhan hukuman yang bahkan lebih ringan dibandingkan masyarakat biasa hingga diberikannya vonis bebas atas perbuatan tersebut, semakin menggambarkan bahwa buruknya sistem dari penjatuhan hukuman bagi pejabat negara khusus di bidang pertahanan yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Padahal sebagai seorang pejabat negara yang memiliki kekuasaan sebagai *Regulator of Legal Right* (pengatur hak hukum) dan juga sebagai pemegang Hak Asasi Manusia yang mana tidak mendapatkan timbal balik atas apa yang mereka perbuat, bahkan seharusnya pejabat negara harus

melindungi setiap individu dari pelanggaran hak asasi manusia. Maka dari itu, sanksi pemidanaan yang diberikan memiliki bobot yang lebih berat dibandingkan masyarakat biasa, hal tersebut dikarenakan pejabat negara memiliki jabatan, kekuasaan, serta *privillage* lainnya sebagai apratur negara yang tidak dapat dimiliki oleh masyarakat biasa pada umumnya.

3. Alasan-Alasan Diperlukan Pengaturan Khusus Terkait Ancaman Pidana Terhadap Pejabat Negara Di Bidang Pertahanan Yang melakukan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Setelah menguraikan berbagai permasalahan baik itu pengaturannya maupun kasus yang terjadi dalam penegakan hukum bagi pejabat negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan mengalami banyak sekali persoalan, maka di perlukan adanya pembaharuan hukum pidana untuk mengatur penghukuman kepada pejabat negara dibidang pertahanan yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan khusus dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang banyak mengatur tentang pelanggaran HAM berat.

Jika dilihat melalui aspek pendekatan dalam pembaharuan hukum pidana maka terdapat 2 pendekatan yang dapat digunakan, yang pertama yaitu perlu diberlakukan pemberatan minimal penghukuman yang saat ini yakni 10 tahun menjadi pemidanaan minimal 20 tahun pemidanaan. hal tersebut berdasarkan pertimbangan pejabat negara merupakan aparatur negara yang memiliki jabatan, kekuasaan, serta *privillage* yang lebih dan tidak dapat dimiliki oleh masyarakat biasa pada umumnya.

Model lain yang dapat diimplementasikan yakni melalui

²¹ <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/putusan-bebas-kasus-pelanggaran-ham-berat-paniai/> (diakses pada tanggal 21 September 2023).

pembuatan regulasi ataupun undang-undang tersendiri yang mengatur keseluruhan mulai dari definisi, bentuk-bentuk hingga kepada pengaturan terkait hukuman bagi pelanggar HAM berat yang dilakukan oleh pejabat negara di bidang pertahanan yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Karena pada dasarnya tujuan dari kepentingan hukum menurut Satochid Kartanegara mengatakan bahwa kepentingan hukum merupakan kepentingan yang harus dijaga agar tidak dilanggar dan yang kesemua itu ditujukan untuk kepentingan masyarakat.²² Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu pembaharuan hukum pidana dalam membentuk suatu aturan khusus yang mengatur tentang kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh pejabat negara dibidang pertahanan demi menciptakan suatu produk hukum yang lebih baik.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tidak ada perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana antara pejabat negara dibidang pertahanan yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan masyarakat sipil biasa. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 42 ayat 1 dan 3 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, serta pada Pasal 599 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dimana dalam pengaturan tersebut adanya pengurangan pidana bagi pelaku yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan hal ini bertentangan dengan pengadilan militer internasional.
2. Di Indonesia dalam membentuk suatu produk perundang-undangan perlu mempertimbangkan 3 faktor yaitu

faktor filosofis, sosiologis dan yuridis. Rendahnya pengaturan dan penghukuman kepada pejabat pertahanan yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pada contoh kasus Brigjen TNI M. Noer Muis dan Mayor Infantri Isak Sattu oleh karena itu perlu adanya suatu pembaharuan hukum pidana kepada pejabat pertahanan yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

B. Saran

1. Perlu adanya pengaturan yang mengatur tentang pelanggaran HAM berat khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh pejabat negara dibidang pertahanan yang lebih mempertegas penjatuhan hukuman.
2. Perlu adanya pemberatan hukuman minimal berupa 20 tahun dari yang sebelumnya 10 tahun penjara kepada pejabat negara dibidang pertahanan yang secara sah dan terbukti melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, karena pada aturan yang sekarang belum memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Tujuannya ialah agar menciptakan efek jera serta pemidanaan yang berbeda dengan masyarakat umum biasa yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal tersebut dikarenakan pejabat negara khususnya dibidang pertahanan memiliki jabatan, kekuatan, wewenang yang lebih tinggi dari masyarakat umum lainnya. jabatan, kekuasaan, serta *privillage* yang lebih sebagai apratur negara yang tidak dapat dimiliki oleh masyarakat biasa pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alkostar, Artidjo. 2007. *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Amrani, Hanafi. 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.

²² Suhariyono AR, Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2009, Vol. 6, No. 4, hlm. 618.

- Bakhri, Syaiful. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- E. Utrecht Di Terjemahkan oleh Moh. Saleh Djindang. 1985. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Penerbit dan Balai Buku Ichtiar.
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Nawawi, Barda Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Semarang: Prenamedia Group.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*. Depok: Rajawali Pers.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- _____. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Sutarto, Endriartono. 2005. *Kewajiban Prajurit Mengabdikan Kepada Bangsa*. Jakarta: Pusat Penerangan TNI.
- Syamsudin, Aziz. 2016. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaidan, Ali. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- B. Jurnal**
- Hakim, Abdul G. Nusantara. 2021. Penerapan Hukum Internasional Dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia, *Indonesian Journal Of Internasional Law*. Vol. 1, No. 4.
- Sagita, Nanda Dewi dan Devica Rully Masrur. 2020. Kejahatan Kemanusiaan (Crime Against Humanity) Di Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Terhadap Muslim Etnis Uighur. *JCA of LAW*, Vol. 1 No. 2.
- Suhariyono AR. 2009. Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 6, No. 4.
- Triwahyuningsih, Susani. 2018. Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol. 2, No. 2.
- Wongkar, Vonny A. 2006. Tanggung Jawab Komando Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat dan Kejahatan Perang Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Thesis*. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Yustitiantingtyas, Levina. 2016. Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi dalam Tindakan Pelanggaran HAM di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Novelty*. Vol. 7, No 1.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- D. Website**
- <https://ylbhi.or.id/informasi/siaranpers/put-usan-bebas-kasus-pelanggaran-ham-berat-paniai/> (diakses pada tanggal 21 September 2023).